

Kendala Perempuan ke Parlemen

TANGGAL 8 Maret 2017 genap 107 tahun peringatan Hari Perempuan Sedunia. Meski sudah 107 tahun dunia memperingati, namun sampai saat ini masih menunjukkan rendahnya peran aktif perempuan Indonesia dalam kepemimpinan. Termasuk kepemimpinan di dunia politik di negeri ini.

Situasi yang tak kondusif bagi perempuan berkiprah di dunia politik di Indonesia sudah diramalkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sejak merdeka, Indonesia belum pernah mencapai 30% representasi perempuan di DPR. Pada pemilu terakhir (2014), jumlah keterwakilan perempuan bahkan jeblak lagi di angka 14% dibandingkan dengan Pemilu 2009 yang hampir 19%. Padahal, sesuai dengan hasil penelitian di negara-negara di seluruh dunia, 30% adalah angka minimal untuk dapat mengubah kebijakan hingga lebih responsif terhadap kesejahteraan rakyat.

Orde Baru

Dari masa ke masa, keterwakilan perempuan dalam parlemen memang mengalami pasang-surut. Pada masa Orde Baru, keberadaan lelaki sebagai penguasa yang agung dan tangguh telah menempatkan perempuan hanya sebagai pendukung dan penggembira. Keberadaan perempuan hanya diharapkan secara biologis: melayani suami, melahirkan dan mengasuh anak, juga mengurus rumah tangga. Bahkan Dharma Wanita yang notabene merupakan badan resmi pemberdayaan perempuan ternyata hanya merupakan kedok. Karena kenyataannya malah menjadi wadah 'pemerdayaan' perempuan. Di sini tugas utama mereka hanyalah menjadi medium atau alat untuk mendukung karir suami mereka. Hak dan kepandaian mereka sebagai perempuan dan individu tidak dihargai sama sekali. Dalam ideologi negara 'keibuan' mereka dituntut untuk patuh membantu suami mereka dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan negara meskipun harus mengorbankan perasaan mereka sendiri.

Sebagai penguasa dan penentu kebijaksanaan dalam keluarga, laki-laki memiliki hak

A Kardiya Wiharyanto

sepenuhnya untuk mengambil setiap keputusan. Hal ini berakibat fatal, karena perempuan seakan menjadi timpang. Misalnya ketika perempuan disakiti dan ditinggalkan laki-laki, mereka menjadi gamang bahkan cenderung menyalahkan diri sendiri. Perempuan di masa Orba tidak berani menyuarakan ketidakadilan yang mereka alami. Belum ada dalil hukum



yang kuat yang dapat melindungi hak-hak mereka. Poligami dan perceraian masih menjadi momok yang mengerikan bagi perempuan karena di antara mereka sendiri belum timbul rasa solidaritas. Mereka memilih diam karena mereka menganggap hal itu sebagai aib yang bisa mencoreng wajah mereka.

Setelah Orde Baru runtuh, perempuan ke luar kandang. Mereka berjuang sendiri (bukan diajukan oleh pemerintah lagi) lewat partai politik, namun jumlahnya tetap kurang memadai. Dalam Pemilu 2014 terdapat 97 perempuan caleg. Artinya andaikata semua terpilih, itu saja baru 17% perempuan yang berada dalam badan legislatif. Dengan demikian,

yang jadi calon saja masih jauh di bawah kuota, apalagi yang terpilih.

Diinventarisasi

Bertolak dari rendahnya representasi perempuan di parlemen selama ini, perlu diinventarisasi kendala-kendalanya agar kuota minimal keterwakilan perempuan di parlemen mendatang terpenuhi. Adapun kendala-kendala tersebut antara lain: (1) faktor ideologi: adanya anggapan perempuan tidak cocok masuk dunia politik; (2) faktor politik: perempuan susah masuk dalam atmosfer klub patriarkal; (3) faktor sosial: tingkat pendidikan perempuan lebih rendah atau beban domestik. Juga (4) faktor ekonomi: tiadanya sumber ekonomi untuk modal kampanye (data seluruh dunia menunjukkan perempuan lebih miskin daripada laki-laki) dan (5) faktor kultural: yang mendahulukan laki-laki, pada hal kedudukan perempuan sejajar dengan laki-laki. Lebih dari 250 perda diskriminatif terhadap perempuan Indonesia telah dihasilkan DPRD. Hal itu seharusnya dapat dihindari jika keterwakilan perempuan mencapai minimal 30%. Sebab, mereka harapan besar bagi perubahan proses pembuatan legislasi yang berpihak pada kaum rentan.

Di negara lain, komposisi 30% kursi perempuan di DPR tidak dapat diganggu gugat. Di Indonesia, kursi 30% perempuan tidak terproteksi dengan baik. Mudah-mudahan dalam Pemilu 2019 keterwakilan perempuan sungguh-sungguh diutamakan dan terproteksi. Jika tidak, Indonesia akan menjadi negara terbelakang dengan keterwakilan perempuan yang selalu rendah. □ - c

Drs A Kardiya Wiharyanto MM,

Dosen Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.